

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 dalam tulisannya yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) yang mengelola perusahaan atas nama pemilik. Dalam hubungan ini, terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, terutama ketika tujuan agen tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Menurut teori ini, manajer sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik, sehingga menciptakan asimetri informasi. Dalam kondisi ini, manajer memiliki peluang untuk bertindak oportunistik demi keuntungan pribadi, salah satunya melalui praktik manajemen laba.

Menurut Muhamad AL Hakim & Anis Syamsu Rizal (2023), “praktik manajemen laba sering dilakukan oleh agen sebagai respons atas dorongan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada prinsipal. Hal ini menjadi bukti nyata terjadinya konflik agensi dalam perusahaan”. Sedangkan Dewi & Djohar (2023) juga menekankan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga bisa dijadikan alat dalam meraih kompensasi pribadi melalui manipulasi laba yang dilaporkan. Untuk mengurangi konflik tersebut, perusahaan biasanya menerapkan mekanisme pengawasan seperti audit,

pemberian insentif berbasis kinerja, atau pembatasan kebijakan akuntansi, namun semuanya memiliki biaya agensi (*agency cost*) tertentu.

2.1.2 Variabel Penelitian

2.1.2.1 Manajemen Laba

1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memengaruhi laporan keuangan dengan tujuan mencapai target tertentu, seperti memenuhi ekspektasi pasar, menjaga stabilitas laba, atau memperoleh bonus berbasis kinerja. Praktik ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk manipulasi akrual, pemilihan metode akuntansi, dan pengaturan waktu transaksi. Menurut Rachma Panggabean et al (2024), manajemen laba merupakan strategi manajer dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu guna memengaruhi angka laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tetap berada dalam kerangka peraturan yang diizinkan (*within GAAP*).

Setyawan et al (2021) juga menyebutkan bahwa manajemen laba dapat dilakukan secara *accrual based* maupun *real activity based*, dan sering kali dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti kewajiban utang, target bonus, dan ekspektasi pasar. Lebih lanjut, Antari Yuliana et al (2023) menjelaskan bahwa manajemen laba bukan sekadar bentuk manipulasi keuangan, tetapi juga merupakan refleksi dari konflik agensi dan motif kontraktual yang melekat dalam organisasi perusahaan moderen. Dalam hal ini, praktik perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sering dimanfaatkan sebagai instrumen utama dalam manipulasi laporan keuangan.

2. Motivasi Manajemen Laba

Manajemen laba dilakukan oleh manajemen perusahaan bukan tanpa alasan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik ini umumnya di latarbelakangi oleh sejumlah motivasi strategis dan ekonomis. Motivasi-motivasi ini berkaitan erat dengan kepentingan pribadi manajer sebagai agen maupun kepentingan perusahaan secara keseluruhan dalam menghadapi tekanan dari pihak eksternal seperti investor, kreditor, maupun otoritas pajak.

1. Motivasi Bonus (*Bonus Motivation*) Salah satu motivasi utama dalam manajemen laba adalah keinginan manajer untuk memperoleh bonus atau insentif berbasis laba. Dalam sistem kompensasi yang mengaitkan kinerja keuangan dengan insentif, manajer cenderung memanipulasi angka laba agar mencapai target yang ditentukan. Rohman et al (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi ketergantungan kompensasi manajemen pada laba yang dilaporkan, semakin besar kecenderungan manajer melakukan manajemen laba melalui manipulasi akun-akun tertentu, termasuk pemanfaatan pajak tangguhan.

2. Motivasi Kepatuhan terhadap Perjanjian Utang (*Debt Covenant Motivation*) Manajemen laba juga dapat dimotivasi oleh kebutuhan perusahaan untuk memenuhi perjanjian atau batasan dalam kontrak utang. Ketika perusahaan hampir melanggar ketentuan (*covenant*), manajemen dapat meningkatkan laba secara artifisial untuk menjaga hubungan dengan kreditor dan menghindari sanksi. Setyawan et al (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi lebih rentan melakukan manajemen laba

untuk menjaga citra kredit yang baik di mata investor dan lembaga keuangan.

3. Motivasi Politik (*Political Cost Motivation*) Perusahaan besar atau perusahaan yang bergerak di sektor strategis cenderung menurunkan laba yang dilaporkan untuk menghindari sorotan publik atau pengawasan dari pemerintah. Dalam hal ini, manajemen laba dilakukan untuk mengurangi risiko intervensi politik atau regulasi. Antari Yuliana et al (2023) menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam industri makanan dan minuman berpotensi mengatur laba agar terlihat lebih kecil, mengingat tingginya pengawasan dari masyarakat dan regulator atas harga dan margin keuntungan sektor ini.
4. Motivasi Efisiensi Pajak (*Tax Motivation*) Motivasi ini berkaitan dengan keinginan perusahaan untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar melalui rekayasa laba. Manajemen dapat memanfaatkan celah dalam ketentuan pajak seperti perbedaan temporer dan metode pengakuan akuntansi agar kewajiban pajak menjadi minimal. Dewi & Djohar (2023) menemukan bahwa perencanaan pajak sering kali menjadi bagian dari strategi manajemen laba, di mana laba diturunkan secara artifisial untuk mengurangi beban pajak terutang pada periode berjalan.
5. Motivasi IPO (*Initial Public Offering Motivation*) Perusahaan yang akan go publik memiliki kecenderungan untuk meningkatkan laba agar terlihat lebih menguntungkan di mata investor. Hal ini dilakukan untuk memperoleh valuasi yang tinggi saat penawaran saham perdana. Rachma Panggabean et

al (2024) menjelaskan bahwa banyak perusahaan sebelum IPO menunjukkan pola peningkatan laba yang tidak wajar, yang pada akhirnya menurun drastis setelah IPO berlangsung.

Dengan berbagai motivasi ini, manajemen laba menjadi fenomena yang kompleks dan sering kali tidak dapat dihindari. Pemahaman terhadap motif-motif tersebut penting dalam menilai kualitas laporan keuangan dan keandalan informasi yang disajikan perusahaan.

3. Pola Manajemen Laba

Manajemen laba tidak hanya dilihat dari apakah manajer melakukannya, tetapi juga bagaimana pola atau strategi mereka dalam mempraktikannya. Penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa manajemen laba dapat dilakukan dalam berbagai pola yang dipengaruhi oleh tujuan, kondisi keuangan perusahaan, serta tekanan eksternal dan internal. Pola-pola ini mencerminkan arah dan intensitas manipulasi yang dilakukan manajemen terhadap angka laba. Pada beberapa penelitian terdahulu ditemui beberapa pola dari manajemen laba diantaranya:

1. Pola *Income Minimization* (Penurunan Laba) Pada pola ini, manajemen secara sengaja menurunkan laba yang dilaporkan, umumnya dengan tujuan menurunkan beban pajak, menghindari sorotan regulator, atau menyiapkan laba yang rendah sebagai pembanding untuk periode mendatang (*income smoothing*).Antari Yuliana et al (2023) menunjukkan bahwa perusahaan pada tahun-tahun dengan laba tinggi cenderung melakukan *income minimization* untuk mengurangi beban pajak yang besar serta menghindari eksposur politik. Dewi & Djohar (2023) juga mengaitkan pola ini dengan

strategi perusahaan dalam meredam ekspektasi pasar agar target laba di masa depan lebih mudah dicapai.

2. Pola *Income Maximization* (Peningkatan Laba) Sebaliknya, dalam pola ini, manajemen berusaha meningkatkan laba dengan tujuan mendapatkan kompensasi lebih tinggi, menarik investor saat IPO, atau memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian utang atau bonus. Setyawan et al (2021) menemukan bahwa manajemen perusahaan cenderung melakukan *income maximization* saat rasio utang meningkat dan menjelang jatuh tempo pelaporan keuangan kepada kreditor. Puspito & Karlina (2024) mengamati bahwa perusahaan yang bersiap melakukan aksi korporasi seperti *merger* atau akuisisi lebih cenderung melaporkan laba yang meningkat melalui manipulasi akrual.
3. Pola *Income Smoothing* (Pemerataan Laba) Pola ini mencerminkan upaya manajer untuk menstabilkan laba dari tahun ke tahun agar tidak terlihat fluktuatif. Pemerataan laba dilakukan untuk memberi kesan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang stabil dan terprediksi. Handayani & Utami (2024) mengidentifikasi praktik *income smoothing* pada perusahaan sektor makanan dan minuman sebagai strategi untuk mempertahankan kepercayaan investor dalam jangka panjang. Rachma Panggabean et al (2024) menyatakan bahwa pola ini sering dilakukan pada periode transisi manajerial atau perubahan kebijakan internal agar laporan keuangan tetap terlihat konsisten.

4. Pola *Timing Strategy* (Strategi Waktu Pengakuan Transaksi) Manajer dapat mengatur waktu pengakuan pendapatan atau beban untuk memengaruhi laba, misalnya dengan mempercepat pengakuan pendapatan pada akhir periode atau menunda beban ke periode berikutnya. Rohman et al (2022) menekankan bahwa manajemen sering memanfaatkan timing differences dalam beban pajak tangguhan sebagai strategi pengaturan waktu laba agar tampak optimal pada laporan keuangan. Puspito & Karlina (2024) juga mengaitkan strategi ini dengan fleksibilitas kebijakan akuntansi yang memungkinkan manajer mengeser pendapatan dan biaya antar periode.

2.1.2.2 Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan Pajak

perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Perencanaan ini dilakukan melalui pemanfaatan ketentuan dan celah dalam peraturan perpajakan yang sah, tanpa melanggar hukum. Menurut Sari & Karlina (2024), perencanaan pajak adalah strategi perusahaan dalam memaksimalkan efisiensi beban pajak melalui pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta pengaturan transaksi bisnis agar menghasilkan kewajiban pajak yang seminimal mungkin. Perencanaan ini menjadi bagian dari pengelolaan keuangan strategis perusahaan. “Perencanaan pajak dilakukan bukan untuk menghindari pajak secara ilegal, tetapi sebagai bagian dari optimalisasi keputusan keuangan perusahaan dengan memanfaatkan insentif dan pengaturan pajak yang tersedia” (Sari & Karlina, 2024).

Menurut penelitian Puspito & Karlina, (2024) menekankan bahwa perencanaan pajak berpotensi dijadikan alat oleh manajemen untuk mengatur laba bersih yang dilaporkan. Hal ini terutama terjadi jika manajemen ingin memberikan kesan efisiensi atau menjaga rasio keuangan tertentu agar tetap menarik bagi investor atau kreditor. Sementara itu, menurut Handayani & Utami (2024), perencanaan pajak adalah upaya perusahaan dalam memproyeksikan dan menyusun strategi pembayaran pajak di masa mendatang secara terencana dan terstruktur, dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku serta struktur operasional perusahaan. “Perencanaan pajak yang dilakukan dengan cermat dapat menurunkan beban pajak secara legal sekaligus meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.” (Handayani & Utami, 2024). Selain itu, Antari Yuliana et al (2023) menambahkan bahwa dalam praktiknya, perencanaan pajak dapat memberikan efek ganda di satu sisi mengefisienkan beban pajak, namun di sisi lain dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba apabila manajemen memiliki motif tertentu seperti kepentingan bonus atau tekanan pemegang saham.

2. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak mencakup berbagai pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak secara legal. Strategi ini dirancang agar perusahaan dapat memanfaatkan celah peraturan perpajakan dan opsi-opsi kebijakan akuntansi yang tersedia guna menekan besarnya pajak terutang, namun tetap dalam koridor hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa strategi umum yang banyak digunakan dan dibahas dalam penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Strategi Pemilihan Metode Akuntansi Perusahaan dapat memilih metode akuntansi tertentu yang diizinkan oleh standar akuntansi dan memberikan pengaruh pada besarnya pajak yang dikenakan, seperti metode penyusutan, pencatatan persediaan (FIFO/LIFO), atau pengakuan pendapatan. (Sari & Karlina, 2024) menyatakan bahwa salah satu strategi perencanaan pajak yang paling umum digunakan adalah pemilihan metode akuntansi yang berdampak pada beban pajak, khususnya dalam depresiasi aset tetap. Metode depresiasi yang dipercepat dapat memperbesar biaya pada awal masa manfaat dan menurunkan laba kena pajak.
2. Penundaan Pengakuan Pendapatan dan/atau Percepatan Biaya Perusahaan dapat menunda pengakuan pendapatan ke periode berikutnya dan mempercepat pengakuan biaya agar laba kena pajak pada periode berjalan menjadi lebih kecil. Handayani & Utami (2024) mengungkapkan bahwa banyak perusahaan melakukan timing strategy sebagai bentuk perencanaan pajak, yaitu dengan mempercepat biaya operasional dan menunda pengakuan pendapatan agar beban pajak pada tahun berjalan dapat ditekan secara signifikan.
3. Pemanfaatan Perbedaan Temporer (*Deferred Tax*) Strategi ini melibatkan penggunaan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal untuk menunda pengakuan beban pajak, misalnya melalui perlakuan berbeda atas penyusutan, cadangan kerugian piutang, atau amortisasi. Puspito & Karlina (2024) menjelaskan bahwa strategi ini dimungkinkan karena adanya fleksibilitas dalam standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Manajemen

dapat menciptakan atau memaksimalkan perbedaan temporer agar kewajiban pajak ditangguhkan ke masa depan.

4. Pemanfaatan Insentif dan Fasilitas Pajak Pemerintah sering menyediakan berbagai insentif pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, atau pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Perusahaan dapat mengarahkan investasi atau kegiatan usaha ke sektor-sektor tersebut untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan. Antari Yuliana et al (2023) menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas perpajakan seperti insentif PPh final UMKM dan insentif pajak daerah sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak perusahaan, terutama di sektor makanan dan minuman yang banyak mendapat perhatian dari pemerintah.
5. Penggunaan Struktur Organisasi dan Transaksi yang Efisien Pajak Perusahaan multinasional atau grup usaha sering merancang struktur perusahaan dan aliran transaksi sedemikian rupa untuk menempatkan laba di yurisdiksi pajak rendah (*low-tax jurisdiction*) atau meminimalkan pajak melalui *transfer pricing* yang masih dalam batas kewajaran. Rohman et al (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan struktur grup atau afiliasi dapat mengatur transaksi antar perusahaan untuk tujuan efisiensi pajak, walau praktik ini harus diawasi secara ketat agar tidak menjurus pada penghindaran pajak agresif.

3. Pengukuran Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai salah satu strategi efisiensi keuangan perlu diukur agar dapat dianalisis secara kuantitatif dalam penelitian. Penelitian-

penelitian terdahulu umumnya mengukur perencanaan pajak menggunakan rasio efektivitas pajak, dengan beberapa pendekatan populer yang menggambarkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menekan beban pajak yang ditanggung. Dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa cara untuk melakukan pengukuran perencanaan pajak diantaranya adalah:

1. *Effective Tax Rate (ETR)*, *Effective Tax Rate (ETR)* adalah pengukuran yang paling umum digunakan untuk menilai perencanaan pajak. ETR menunjukkan proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak, Dewi & Djohar (2023) menggunakan ETR sebagai indikator efisiensi pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin efektif perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Nilai ETR normal berkisar antara 25%–30%, bergantung pada tarif pajak yang berlaku.
2. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, CETR mengukur proporsi pajak kas aktual yang dibayar terhadap laba sebelum pajak. Ini dianggap sebagai indikator yang lebih realistis dibandingkan ETR karena mencerminkan arus kas riil. Sari & Karlina (2024) menjelaskan bahwa CETR digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menekan pembayaran pajak aktual, dan bahwa nilai CETR rendah mengindikasikan adanya perencanaan pajak berbasis arus kas yang agresif.
3. *Book Tax Differences (BTD)*, BTD mengukur selisih antara laba akuntansi dengan laba kena pajak. Perbedaan ini timbul karena perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal, yang dapat mencerminkan adanya aktivitas perencanaan pajak. Puspito & Karlina (2024) menggunakan BTD untuk

mendeteksi indikasi praktik perencanaan pajak yang berbasis akrual, seperti penggunaan cadangan biaya atau perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal.

4. *Tax Saving*, *Tax Saving* dihitung sebagai selisih antara beban pajak berdasarkan tarif normal dengan beban pajak aktual yang dibayar. Ini menggambarkan efisiensi pajak dari strategi yang dilakukan. Penelitian Antari Yuliana et al (2023) menggunakan konsep *tax saving* untuk mengukur keberhasilan strategi perencanaan pajak dalam mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara legal.

2.1.2.3 Beban Pajak Tangguhan

1. Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) adalah komponen dari pajak penghasilan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi menurut standar akuntansi keuangan dan laba kena pajak menurut peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan pajak yang diakui dalam laporan laba rugi berbeda waktunya dengan pajak yang dibayarkan secara aktual. Menurut Rohman et al (2022), beban pajak tangguhan mencerminkan akumulasi dari selisih waktu pengakuan antara pendapatan dan beban menurut laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yang akan berbalik pada periode berikutnya. Beban ini timbul karena adanya perbedaan temporer seperti perbedaan metode penyusutan, amortisasi, atau pencatatan cadangan kerugian. “Beban pajak tangguhan bukanlah pajak yang benar-benar dibayar saat ini, tetapi pajak yang akan dibayar atau

diperoleh kembali di masa mendatang sebagai konsekuensi dari perbedaan temporer yang dikenali saat ini.” (Rohman et al., 2022)

Menurut penelitian Puspito & Karlina (2024) menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan muncul karena adanya pendekatan yang berbeda antara standar akuntansi dan sistem perpajakan dalam memperlakukan suatu transaksi. Pajak tangguhan ini mencerminkan ekspektasi pembayaran pajak di masa depan dan menunjukkan estimasi manajemen atas kondisi keuangan ke depan. “Pajak tangguhan juga bisa menjadi sinyal adanya praktik manajemen laba, karena perbedaan temporer dapat diciptakan secara strategis untuk memengaruhi besarnya laba bersih yang dilaporkan” (Puspito & Karlina, 2024). Menurut Handayani & Utami (2024), beban pajak tangguhan memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Beban Pajak Tangguhan Positif (Liabilitas Pajak Tangguhan): terjadi ketika laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal.
2. Beban Pajak Tangguhan Negatif (Aset Pajak Tangguhan): terjadi ketika laba fiskal lebih besar dari laba akuntansi.

“Beban pajak tangguhan memberikan gambaran bagaimana manajemen mengelola timing pengakuan pendapatan dan beban, serta memperlihatkan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan” (Handayani & Utami, 2024).

2. Implementasi Akuntansi Pajak Tangguhan

Implementasi beban pajak tangguhan dalam praktik akuntansi perusahaan mencerminkan bagaimana manajemen mengakui dan memperlakukan selisih temporer antara laba komersial dan laba fiskal dalam laporan keuangan. Beban ini

biasanya diakui dalam laporan laba rugi dan neraca melalui akun aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan, tergantung pada arah perbedaan yang terjadi. Menurut Rohman et al (2022), implementasi pajak tangguhan dilakukan dengan cara mencatat perbedaan temporer sebagai liabilitas atau aset di neraca, yang akan berbalik pada periode-periode mendatang. Perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh perbedaan tersebut terhadap pajak yang ditangguhkan. “Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengukur perbedaan temporer secara akurat untuk memastikan bahwa penyajian beban pajak tangguhan tidak hanya sesuai standar akuntansi, tetapi juga tidak disalahgunakan untuk tujuan manipulatif.” (Rohman et al., 2022).

Menurut Puspito & Karlina (2024) menemukan bahwa perusahaan sering kali menggunakan pajak tangguhan secara strategis, misalnya dengan menciptakan cadangan kerugian piutang atau depresiasi yang berbeda antara komersial dan fiskal. Dalam implementasinya, hal ini dapat mempengaruhi beban pajak yang dilaporkan dan, secara tidak langsung, laba bersih perusahaan. “Pajak tangguhan merupakan salah satu komponen yang fleksibel dalam laporan keuangan dan memiliki potensi besar digunakan sebagai sarana manajemen laba melalui pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban.” (Chandra Puspito & Karlina, 2023).

Dalam praktik industri manufaktur, Handayani dan Utami (2024) menemukan bahwa beban pajak tangguhan sering kali timbul dari perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dan fiskal. Perusahaan memilih menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*) untuk keperluan laporan keuangan

dan metode saldo menurun (*declining balance*) untuk keperluan pajak. Hal ini menciptakan selisih yang dicatat sebagai pajak tangguhan. “Dalam praktiknya, manajemen bisa mengatur besar kecilnya beban pajak tangguhan dengan menetapkan kebijakan akuntansi tertentu yang berdampak pada waktu pengakuan pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan.” (Handayani & Utami, 2024).

2.1.3 Hubungan Antara variabel Perencanaan Pajak & Beban Pajak Tangguhan (variabel bebas), dan Manajemen Laba (variabel dependen)

Hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba telah menjadi topik penelitian yang menarik dalam literatur akuntansi dan perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam kajian ini memiliki temuan yang beragam mengenai hubungan antara ketiga variabel tersebut.

2.1.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak dan manajemen laba merupakan dua aktivitas strategis yang sering dilakukan perusahaan dalam rangka mengoptimalkan laba dan efisiensi beban pajak. Secara teori, adanya perencanaan pajak yang agresif atau kreatif berpotensi mendorong praktik manajemen laba karena keduanya melibatkan kebijakan akuntansi yang fleksibel dan mempengaruhi jumlah laba bersih yang dilaporkan. Menurut Dewi & Djohar (2023), perencanaan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban, yang juga merupakan ciri dari manajemen laba. Ketika manajemen ingin menekan beban pajak, mereka cenderung menurunkan laba kena pajak yang sekaligus dapat

menurunkan laba akuntansi, terutama pada akhir tahun fiskal. “Perusahaan dengan tingkat perencanaan pajak tinggi memiliki kecenderungan lebih besar dalam melakukan manajemen laba karena adanya tekanan untuk menunjukkan efisiensi dan kinerja keuangan yang stabil” (Dewi & Djohar, 2023).

Penelitian Sari dan Karlina (2023) menemukan bahwa perencanaan pajak dapat menjadi sarana yang legal namun strategis untuk memanipulasi laporan laba, terutama ketika manajemen memiliki asimetri informasi dan keleluasaan dalam memilih metode akuntansi. Dalam konteks ini, perencanaan pajak bukan hanya sekadar efisiensi pajak, melainkan juga bagian dari strategi manipulasi laba. “Manajemen dapat memilih metode depresiasi atau pengakuan cadangan yang berdampak pada beban pajak dan laba, sehingga praktik perencanaan pajak dapat selaras dengan praktik manajemen laba” (Sari & Karlina, 2023).

Dalam penelitian oleh Chandra Puspito & Karlina (2023) pada perusahaan sektor manufaktur, ditemukan bahwa semakin kompleks strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk mengatur laba melalui akun-akun yang berkaitan dengan beban pajak, seperti akun beban tangguhan dan cadangan. “Perencanaan pajak dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan rekayasa laba karena keduanya melibatkan estimasi dan kebijakan yang bersifat judgmental” (Chandra Puspito & Karlina, 2023).

Selain itu, Rohman et al (2022) menjelaskan bahwa manajemen menggunakan perencanaan pajak tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mencapai target laba tertentu yang diharapkan oleh pemegang saham atau kreditor. Dalam situasi tertentu, perencanaan pajak menjadi topeng untuk menyembunyikan

praktik manajemen laba yang lebih luas. “Dalam situasi tekanan eksternal tinggi, perencanaan pajak menjadi instrumen yang digunakan manajemen untuk menyamarkan manajemen laba, terutama melalui akun-akun yang tidak transparan bagi pengguna laporan keuangan” (Rohman et al., 2022).

2.1.3.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan salah satu akun yang berpotensi dimanfaatkan oleh manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh sifat beban pajak tangguhan yang fleksibel, karena berasal dari perbedaan temporer yang masih memungkinkan untuk diatur melalui kebijakan akuntansi tertentu. Menurut Handayani dan Utami (2024), beban pajak tangguhan memiliki hubungan erat dengan manajemen laba karena memungkinkan perusahaan untuk menunda pengakuan beban pajak saat ini dan menggesernya ke periode mendatang. Penundaan ini dapat meningkatkan laba bersih pada periode berjalan, tanpa benar-benar mengubah arus kas. “Manajemen cenderung memanfaatkan beban pajak tangguhan untuk meningkatkan laba pada periode tertentu, terutama ketika perusahaan berada dalam tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik” (Handayani & Utami, 2024).

Berdasarkan Puspito & Karlina (2024) juga menyatakan bahwa pajak tangguhan dapat dimanipulasi dengan cara memilih metode penyusutan atau amortisasi tertentu yang menghasilkan perbedaan temporer lebih besar. Hal ini menciptakan liabilitas atau aset pajak tangguhan yang digunakan untuk merekayasa beban pajak periode berjalan, dan secara tidak langsung memengaruhi laba bersih. “Pajak tangguhan menjadi ruang abu-abu dalam praktik akuntansi yang sering

dimanfaatkan untuk manajemen laba karena pengaturannya bergantung pada estimasi dan kebijakan manajemen” (Chandra Puspito & Karlina, 2023). Dalam penelitian oleh Rohman et al (2022), ditemukan bahwa perusahaan dengan nilai beban pajak tangguhan yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar dalam melakukan manajemen laba, khususnya melalui metode *accrual-based earnings management*. Ini karena pajak tangguhan umumnya berkaitan dengan akun-akun akrual seperti cadangan kerugian piutang, persediaan, dan penyusutan. “Semakin besar beban pajak tangguhan, semakin besar fleksibilitas manajemen dalam mengatur laba bersih melalui akun-akun yang menimbulkan perbedaan temporer” (Rohman et al., 2022).

Sari dan Karlina (2023) juga menambahkan bahwa perusahaan sering kali mengakumulasi beban pajak tangguhan sebagai sinyal konservatisme, tetapi dalam beberapa kasus justru digunakan untuk menyamarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, terutama menjelang periode audit atau pelaporan publik. “Pajak tangguhan dapat menciptakan ilusi stabilitas laba jangka pendek, padahal yang terjadi adalah pergeseran beban ke masa depan untuk kepentingan pencitraan kinerja keuangan.” (Sari & Karlina, 2023)

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar untuk mengidentifikasi celah penelitian dan memperkuat argumen teoritis dalam studi ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba antara lain sebagai berikut:

1. Muhamad Al Hakim dan Anis Syamsu Riza (2021) meneliti pengaruh *tax planning* dan *corporate governance* terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada penggunaan variabel *tax planning* dan manajemen laba, sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan variabel strategi bisnis sebagai moderasi dan tidak adanya batasan sektor perusahaan secara spesifik.
2. Putri Istiana Dewi dan Chaidir Djohar (2022) juga mengkaji pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021). Penelitian ini menyimpulkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap manajemen laba, tetapi pengaruhnya dapat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan. Persamaannya adalah pada dua variabel utama yang sama, sedangkan perbedaannya terdapat pada penggunaan variabel moderasi.
3. Saifur Rohman, Nina Sabrina, dan M. Orba Kurniawan (2022) meneliti Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI 2017-2020). Hasilnya menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *tax planning* tidak berpengaruh. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada ketiga variabel yang

digunakan secara simultan, sementara perbedaannya adalah pada hasil yang menunjukkan *tax planning* tidak berpengaruh, serta tidak adanya fokus pada subsektor makanan dan minuman.

4. Novi Antari Yuliana, Tutty Nuryati, Elia Rossa, dan Nera Marinda Machdar (2023) meneliti Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Persamaannya terletak pada penggunaan dua variabel utama yang sama, namun berbeda hasil dan ruang lingkup industri yang diteliti.
5. Wisnu Setyawan, Siska Wulandari, dan Widyaningrum (2023) fokus pada Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba berbasis akrual. Persamaannya terletak pada variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba.
6. Vera Melvia, Dian Puji Puspita Sari, dan Rama Gita Suci (2023) meneliti pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, kualitas audit, dan opini audit terhadap manajemen laba (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bej tahun 2018-2022). Penelitian ini menyimpulkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Persamaannya adalah pada substansi perencanaan pajak dan tujuannya terhadap laba, sementara perbedaannya pada istilah dan ruang lingkup variabel pajak yang lebih luas.

7. Elka Sari dan Lilis Karlina (2023) juga menemukan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman. Penelitian ini memiliki kesamaan yang kuat dengan penelitian ini, baik dari segi variabel maupun sektor industri. Perbedaannya adalah pada tidak digunakannya variabel beban pajak tangguhan.
8. Giovani Wibisono Chandra Puspito dan Lilis Karlina (2023) meneliti Pengaruh *Tax Planning*, Aset Pajak Tangguhan, dan *Tax Avoidance* terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022) dan menemukan adanya pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel *tax planning*. Persamaannya adalah pada fokus terhadap variabel pajak tangguhan dan *earnings management*, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak digunakannya *tax planning*.
9. Nazla Rachma Panggabean, Johari Sitompul, dan Friliana Sitompul (2023) mengkaji pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kuat pengaruh *tax planning* terhadap manajemen laba. Persamaannya adalah pada variabel utama yang sama, sementara perbedaannya pada penggunaan sampel.
10. Mery Handayani dan Tri Utami (2024) meneliti Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini serupa dari sisi variabel perencanaan pajak

dan beban pajak tangguhan, namun tidak berfokus pada subsektor makanan dan minuman.

Berdasarkan tinjauan dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa baik perencanaan pajak maupun beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. Namun demikian, masih terdapat perbedaan temuan tergantung pada sektor industri, metode pengukuran, dan periode waktu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperluas cakupan kajian dengan fokus pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama tahun 2020–2024.

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	pengaruh <i>tax planning</i> dan <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba Muhamad Al Hakim dan Anis Syamsu Riza (2021)	Variabel independen: <i>Tax planning</i> (X1) Variabel dependen: Manajemen laba (Y)	Variabel independen: <i>corporate governance</i> (X2) Tahun pengamatan : 2017-2021	<i>tax planning</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
2	pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang	Variabel independen: Beban pajak tangguhan (X1), Perencanaan pajak (X2) Variabel dependen:	Variabel independen: Penghindaran pajak (X3) subjek penelitian: perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i>	<i>tax planning</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
	terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021) Putri Istiana Dewi dan Chaidir Djohar (2022)	manajemen laba (Y)	Tahun pengamatan: 2017-2021	
3	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI 2017-2020). Saifur Rohman, Nina Sabrina, dan M. Orba Kurniawan (2022)	Variabel independen: Perencanaan pajak (X1), Beban pajak tangguhan (X2) Variabel dependen: manajemen laba (Y)	Subjek penelitian: Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Tahun pengamatan: 2017-2020	beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan <i>tax planning</i> tidak berpengaruh.
4	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba Novi Antari Yuliana, Tutty Nuryati, Elia Rossa, dan Nera Marinda Machdar (2023)	Variabel independen: Perencanaan pajak (X1), Beban pajak tangguhan (X2) Variabel dependen: manajemen laba (Y)	Variabel independen: Penghindaran pajak (X3) Tahun pengamatan: 2017-2021	bahwa <i>tax planning</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
5	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. Wisnu Setyawan,	Variabel independen: Perencanaan pajak (X1), Beban pajak tangguhan (X2)	Variabel independen: Profitabilitas (X3) Tahun pengamatan: 2015-2019	beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
	Siska Wulandari, dan Widyaningrum (2023)	Variabel dependen: manajemen laba (Y)		
6	pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, kualitas audit, dan opini audit terhadap manajemen laba (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bea tahun 2018-2022). Vera Melvia, Dian Puji Puspita Sari, dan Rama Gita Suci (2023)	Variabel independen: Perencanaan pajak (X1), Beban pajak tangguhan (X2) Variabel dependen: manajemen laba (Y)	Variabel independen: Kualitas audit (X3), Opini audit (X4) Subjek penelitian: perusahaan perbankan Tahun pengamatan: 2018-2022	<i>tax planning</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
7	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022) Elka Sari dan Lilis Karlina (2023)	Variabel independen: <i>Tax planning</i> (X1), Beban Pajak (X3) Variabel dependen: manajemen laba (Y) Subjek penelitian: Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman	Variabel independen: Aset Pajak Tangguhan (X2) Tahun pengamatan: 2018-2022	<i>tax planning</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba
8	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Aset Pajak Tangguhan, dan <i>Tax Avoidance</i> terhadap	Variabel independen: <i>Tax</i>	Variabel independen: Aset Pajak Tangguhan	<i>tax planning</i> berpengaruh positif signifikan

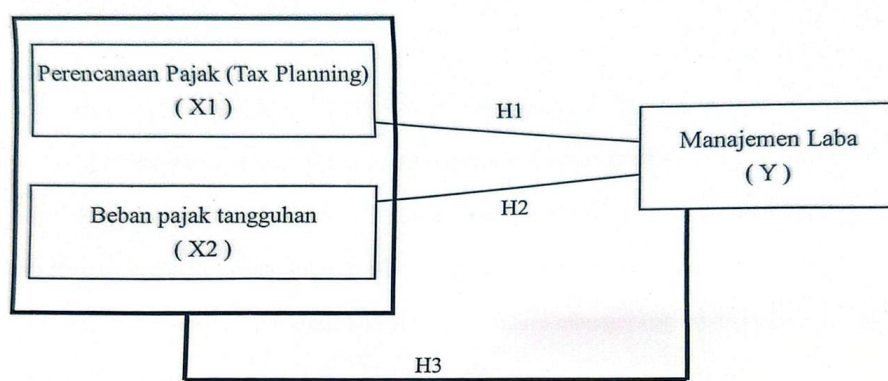
No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
	Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022) Giovanni Wibisono Chandra Puspito dan Lilis Karlina (2023)	<i>planning</i> (X1) Variabel dependen: manajemen laba (Y) Subjek penelitian: Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman	(X2), <i>Tax Avoidance</i> (X3) Tahun pengamatan: 2018-2022	terhadap manajemen laba
9	pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Nazla Rachma Panggabean, Johari Sitompul, dan Friliana Sitompul (2023)	Variabel independen: Beban pajak tangguhan (X1), Perencanaan pajak (X2) Variabel dependen: manajemen laba (Y)	Tahun pengamatan: 2020-2022	<i>tax planning</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba
10	Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Mery Handayani dan Tri Utami (2024)	Variabel independen: Perencanaan Pajak (X1), Beban Pajak Tangguhan (X3) Variabel dependen: manajemen laba (Y)	Variabel independen: Aset Pajak Tangguhan (X2) Tahun pengamatan: 2018-2022	<i>tax planning</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu dan uraian landasan teori, maka hubungan antar variabel dapat digambarkan melalui model kerangka konsep penelitian pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Pada gambar kerangka konseptual tersebut merupakan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (X1), dan Beban pajak tangguhan (X2), terhadap Manajemen laba (Y). Gambaran kerangka konseptual yang diatas memiliki tujuan untuk mengetahui variabel independen yang akan diuji peneliti yaitu Perencanaan pajak (*tax planning*), dan Beban pajak tangguhan serta variabel dependen yaitu Manajemen laba. H1 merupakan hipotesis dari pengaruh Perencanaan pajak (*tax planning*) (X1) terhadap Manajemen Laba (Y), sementara H2 merupakan hipotesis dari pengaruh Beban pajak tangguhan (X2) terhadap Manajemen laba (Y), dan H3 merupakan pengaruh dari Perencanaan pajak (*tax planning*) (X1) dan Beban pajak tangguhan (X2) terhadap Manajemen laba (Y).

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini mengacu pada teori agensi dan sebagai dasar konseptual, serta didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal), yang mendorong manajer untuk mengambil tindakan seperti manajemen laba guna memaksimalkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, manajemen laba dapat terjadi sebagai hasil dari keputusan strategis yang berkaitan dengan pajak, baik dalam bentuk perencanaan pajak maupun pengelolaan beban pajak tangguhan. Selain itu Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil temuan empiris dari sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti seperti (Antari Yuliana et al., 2023; Dewi & Djohar, 2023; Handayani & Utami, 2024; Muhamad AL Hakim & Anis Syamsu Rizal, 2023; Puspito & Karlina, 2024; Rachma Panggabean et al., 2024; Rohman et al., 2022; Sari & Karlina, 2024; Setyawan et al., 2021; Vera Melvia, 2025), dan beberapa peneliti lainnya. Seluruh hipotesis dirumuskan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba baik secara parsial maupun simultan. Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini:

2.3.1 Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Dalam penelitian Muhamad Al Hakim dan Anis Syamsu Riza (2021), ditemukan bahwa perusahaan dengan tingkat perencanaan pajak yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih dalam

mengatur pengakuan pendapatan dan beban sehingga dapat memengaruhi besaran laba yang dilaporkan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Elka Sari dan Lilis Karlina (2023), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk menyusun strategi keuangan dalam rangka mengelola beban pajak sekaligus memengaruhi laporan laba.

Selain itu, Giovani Wibisono Chandra Puspito dan Lilis Karlina (2023) menambahkan bahwa perencanaan pajak dapat menjadi indikator adanya niat manajemen untuk mengatur laba secara sistematis. Perencanaan pajak juga memberi peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan perbedaan peraturan pajak dan akuntansi sebagai celah dalam praktik *earnings management*. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka hipotesis pertama yang dirumuskan adalah:

H1: Perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba

Beban pajak tangguhan menggambarkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang terjadi karena perlakuan yang berbeda antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Dalam konteks ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa manajemen memanfaatkan beban pajak tangguhan untuk melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan.

Saifur Rohman, Nina Sabrina, dan M. Orba Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba,

karena memberikan peluang bagi perusahaan untuk menunda kewajiban pajak, sehingga meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Penelitian Putri Istiana Dewi dan Chaidir Djohar juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara perubahan beban pajak tangguhan dan pola manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H2: Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

2.3.3 Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih kuat Ketika kedua variabel tersebut dianalisis secara bersamaan. Saifur Rohman et al (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama (simultan) mempengaruhi manajemen laba. Hal ini karena kombinasi strategi efisiensi pajak dan pengelolaan waktu pengakuan pajak menciptakan ruang yang lebih besar bagi manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan tujuan tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Perencanaan Pajak dan Beban pajak tangguhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.